



# LAPORAN KINERJA

## TRIWULAN I TAHUN 2025

**PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

## PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat dan hidayah-NYA sehingga Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong Triwulan I Tahun Anggaran 2025 dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Laporan Kinerja merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran program dan indikator kinerja PPN Brondong Tahun Anggaran 2025.

Penyusunan Laporan Kinerja PPN Brondong mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang memiliki manfaat sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi kepada masyarakat, serta sebagai alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja pegawai di lingkungan PPN Brondong. Kinerja PPN Brondong diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh pegawai di lingkungan PPN Brondong dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Lamongan, 15 April 2025  
Kepala Pelabuhan Perikanan  
Nusantara Brondong



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tugas Dan Fungsi.....	2
1.3. Struktur Organisasi dan SDM PPN Brondong .....	3
1.4. Permasalahan.....	4
1.5. Sistematika Penyajian.....	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	7
2.1. Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 .....	7
2.2. Rencana Aksi Penetapan Kinerja.....	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	13
3.1. Capaian Kinerja Organisasi .....	13
3.2. Realisasi Anggaran.....	38
BAB IV PENUTUP .....	39
LAMPIRAN .....	40

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin .....	4
Tabel 2 Target Kinerja PPN Brondong Tahun 2025 .....	7
Tabel 3 Alokasi Anggaran PPN Brondong Tahun 2025 .....	8
Tabel 4 Rencana Aksi PPN Brondong Tahun 2025 .....	10
Tabel 5 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Triwulan I Tahun 2025 .....	13
Tabel 6 Jenis Penerimaan PNBP di PPN Brondong .....	14
Tabel 7 Target dan Realisasi Penerimaan PNBP Non SDA Triwulan I Tahun 2025	15
Tabel 8 Perbandingan Realisasi Penerimaan PNBP Non SDA dengan Periode Sebelumnya .....	15
Tabel 9 Target dan Realisasi Jumlah Produksi Perikanan Tangkap .....	17
Tabel 10 Perbandingan Realisasi Volume Produksi Perikanan Tangkap dengan Periode Sebelumnya .....	17
Tabel 11 Target dan Realisasi Tingkat Kinerja PPN Brondong Triwulan I Tahun 2025 .....	19
Tabel 12 Perbandingan Realisasi Tingkat Kinerja PPN Brondong dengan Periode Sebelumnya .....	20
Tabel 13 Target dan Realisasi Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Brondong Triwulan I Tahun 2025 .....	23
Tabel 14 Perbandingan Realisasi Nilai Pengendalian Lingkungan .....	23
Tabel 15 Target dan Realisasi Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan .....	25
Tabel 16 Perbandingan Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan Lingkungan .....	26
Tabel 17 Target dan Realisasi Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk .....	29
Tabel 18 Perbandingan Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan dengan periode sebelumnya .....	29
Tabel 19 Realisasi Tingkat Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Tahun 2025 .....	33
Tabel 20 Target dan Realisasi Tingkat Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di PPN Brondong Triwulan I Tahun 2025 .....	33
<i>Tabel 21 Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di PPN Brondong dengan periode sebelumnya .....</i>	<i>33</i>
Tabel 22 Target dan Realisasi Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup PPN Brondong Triwulan I Tahun 2025 .....	37
Tabel 23 Perbandingan Persentase Rekomendasi Hasil Penyelenggaraan SKM ....	37
Tabel 24 Realiasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan PPN Brondong Tahun 2025 ....	38

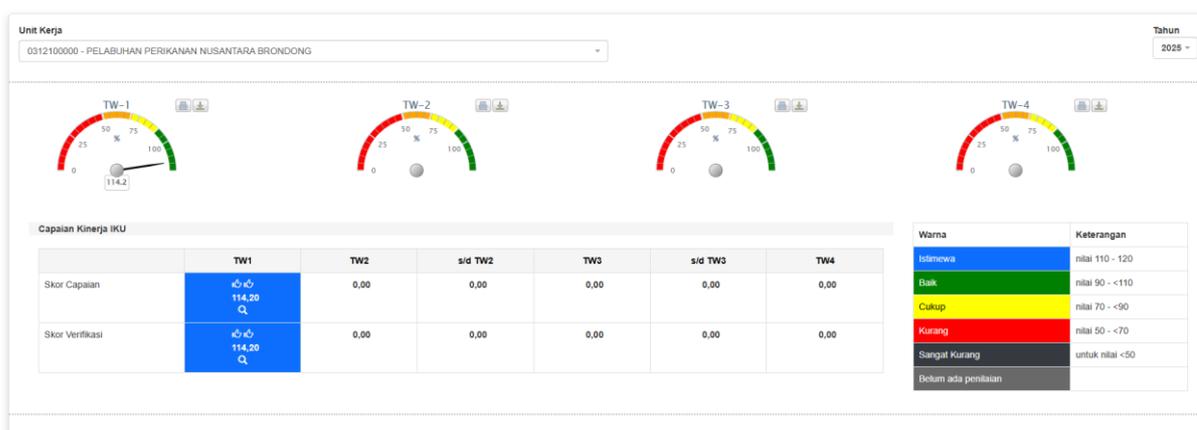
## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Tampilan Dashboard Kinerja PPN Brondong .....	v
Gambar 2 Struktur Organisasi PPN Brondong 2025 .....	3
Gambar 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan.....	4
Gambar 4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	4
Gambar 5 Grafik Realisasi PNBPN Non SDA Per Bulan di PPN Brondong Triwulan I Tahun 2025 .....	15
Gambar 6 Grafik Realisasi Volume Produksi Perikanan Tangkap Per Bulan .....	17
Gambar 7 Grafik Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Triwulan I Tahun 2025.....	20
Gambar 8 Grafik Realisasi Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Brondong Per Bulan .....	23
Gambar 9 Data IK Selaraskan Lingkup DJPT Triwulan I Tahun 2025 .....	23
Gambar 10 Grafik Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan di PPN Brondong Per Bulan .....	26
Gambar 11 Dashboard Aplikasi SIDAK.....	29
Gambar 12 Hasil Penyelenggaraan SKM Triwulan I Tahun 2025 Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap .....	37

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong sebagai Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas umum pemerintahan di pelabuhan perikanan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap.

Pada Tahun 2025, PPN Brondong mendapatkan alokasi awal anggaran sebesar Rp. 15.058.405.000,- dengan realisasi belanja sampai dengan Triwulan I sebesar Rp. 3.064.310.784,- atau 20.35%. Secara kinerja PPN Brondong mendapatkan Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 114,20 kategori **Istimewa** yang dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1 Tampilan Dashboard Kinerja PPN Brondong

Ketercapaian Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 114,20 didukung oleh tercapainya 8 capaian indikator kinerja meliputi :

- IK 1 - Penerimaan PNBPN Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong
- IK 2 - Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong
- IK 4 - Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong
- IK 7 - Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong
- IK 8 - Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan

- IK 11 - Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong
- IK 14 - Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong
- IK 18 - Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong

Pengukuran kinerja berbasis BSC merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada capaian indikator kinerja utama (pencapaian output) yang telah diidentifikasi untuk tercapainya sasaran strategis (pencapaian outcome). Capaian kinerja PPN Brondong Triwulan I Tahun 2025 dipengaruhi oleh adanya perencanaan, pelaksanaan kegiatan yang melibatkan seluruh komponen di PPN Brondong serta monitoring dan evaluasi secara berkala. Dalam meningkatkan kinerja kedepan dipandang perlu ketersediaan SDM yang berkompeten dan sesuai dengan beban kerja di PPN Brondong, serta ketersediaan sarana dan prasana yang sesuai dengan kebutuhan kinerja.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan perikanan tangkap, PPN Brondong melaksanakan 3 (tiga) kegiatan, yaitu :

1. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan.
2. Pengelolaan Sumber Daya Ikan.
3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab diperlukan pertanggungjawaban dari penyelenggara negara yang dilaporkan pada akhir tahun anggaran dalam suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengatur bahwa segala pelaksanaan pembangunan oleh instansi pemerintah agar dilaporkan secara akuntabel sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan meliputi pertanggungjawaban penggunaan anggaran, keberhasilan yang dicapai, kegagalan pelaksanaan serta permasalahan – permasalahan yang dihadapi yang disertai dengan tindak lanjut pelaksanaan di tahun mendatang. Tujuan dari pelaporan kinerja ini yakni :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai; dan
2. Menjadi dasar untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Wujud pelaporan kinerja dimaksud adalah Laporan Kinerja PPN Brondong yang disusun setiap tahun. Berkaitan dengan hal tersebut, Laporan Kinerja PPN Brondong

Tahun 2025 disusun untuk mengukur pencapaian indikator kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja PPN Brondong Tahun 2025 dalam mewujudkan misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja ini adalah salah satu bentuk media pertanggungjawaban kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan terhadap kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab bisa diwujudkan.

## 1.2. Tugas Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap, tugas PPN Brondong adalah melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan serta keselamatan operasional kapal perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut PPN Brondong menyelenggarakan fungsinya:

1. Penyusunan, pemantuan, dan evaluasi rencana program dan anggaran, serta pelaporan dibidang pelabuhan perikanan;
2. Pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan;
3. Pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Laport Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan;
4. Pelaksanaan pemeriksaan *Log Book* penangkapan ikan;
5. Pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;
6. Pelaksanaan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan;
7. Pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
8. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan dan pengawasan serta pengendalian sarana dan prasarana;
9. Pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu serta pengolahan, pemasaran dan distribusi hasil perikanan;
10. Pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha;
11. Pelaksanaan pengumpulan data, informasi dan publikasi;
12. Pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik;

13. Pelaksanaan inspeksi pengendalian mutu hasil perikanan pada kegiatan penangkapan ikan;
14. Pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan;
15. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

### 1.3. Struktur Organisasi dan SDM PPN Brondong

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi maka disusun struktur organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara, sebagai berikut :

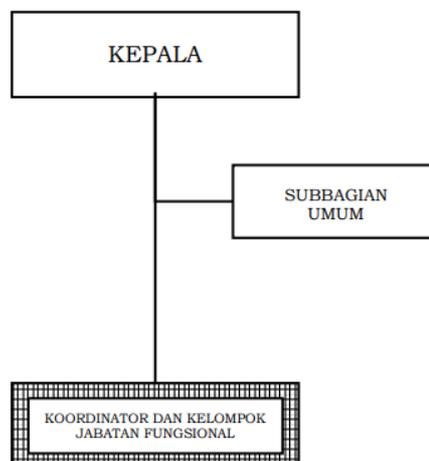
#### 1.3.1. Subbagian Umum

Melakukan urusan hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

#### 1.3.2. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan masing-masing. Dalam pelaksanaan tugas tersebut ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap. Tugas koordinator tersebut adalah mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan masing-masing fungsional sesuai dengan bidang tugasnya.

STRUKTUR ORGANISASI  
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA

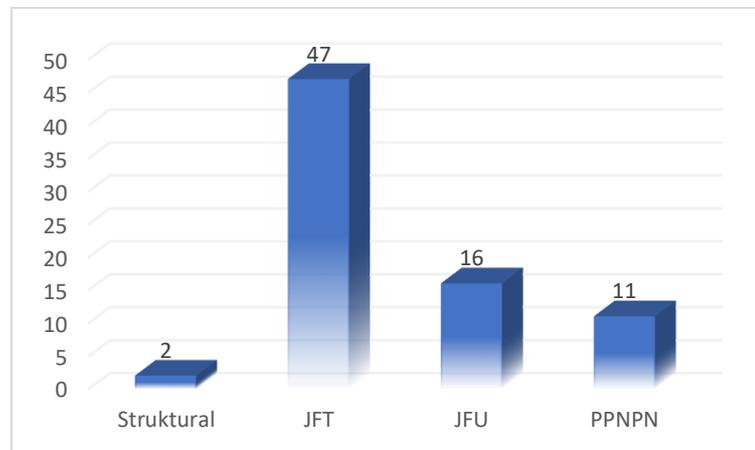


Gambar 2 Struktur Organisasi PPN Brondong 2025

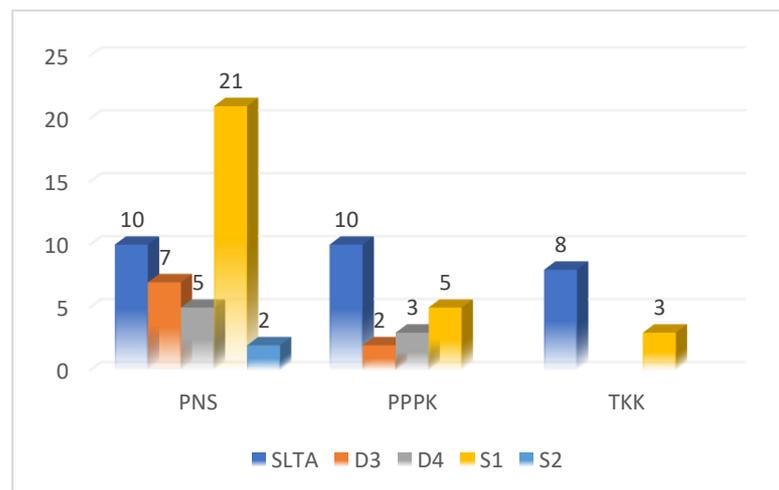
PPN Brondong di dukung oleh 76 orang pegawai yang terdiri atas PNS 45 orang (60,26%), PPPK 20 orang (25,64%) dan PPNPN 11 orang (14,10%). Komposisi pegawai di PPN Brondong pada Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut :

*Tabel 1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin*

Status	Golongan/Jenis Kelamin								Jumlah		
	I		II		III		IV		L	P	L+P
	L	P	L	P	L	P	L	P			
PNS	-	-	6	3	22	13	1	-	29	16	45
PPPK	-	-	9	3	5	3	-	-	14	6	20
PPNPN	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
Jumlah	11	-	15	6	28	17	1	-	-	-	76



*Gambar 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan*



*Gambar 4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan*

#### 1.4. Permasalahan

Secara umum perikanan tangkap memiliki permasalahan yang cukup kompleks yang disebabkan oleh banyak factor dan juga sensitive terhadap interaksi terutama dengan aspek lingkungan. Permasalahan dalam

pembangunan perikanan tangkap mencakup berbagai kelemahan yang terdapat di internal sistem perikanan tangkap maupun berbagai ancaman yang berasal dari luar sistem perikanan tangkap. Permasalahan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima) permasalahan utama, yakni sebagai berikut:

- 1. Kapasitas nelayan;** Belum optimalnya kemampuan nelayan dalam menerapkan teknologi penangkapan ikan yang produktif dan ramah lingkungan serta minimnya pengetahuan tentang cara penanganan ikan yang baik di atas kapal perikanan bagi sebagian nelayan.
- 2. Kesejahteraan nelayan:** Belum terpenuhinya kebutuhan dasar bagi sebagian keluarga nelayan yang disebabkan rendahnya kemampuan nelayan dalam pengelolaan keuangan dalam merespon kerentanan usaha penangkapan ikan.
- 3. Mindset masyarakat perikanan tangkap;** Bagi sebagian nelayan, usaha penangkapan ikan masih terbatas bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ataupun kebutuhan jangka menengah, belum sampai sepenuhnya pada upaya mendukung industrialisasi ataupun menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan.
- 4. Sarana prasarana usaha penangkapan ikan;** Belum optimalnya pengembangan infrastruktur dan integrasi konektivitas sistem informasi antar pelabuhan perikanan, serta; masih rendahnya produktivitas armada perikanan, termasuk dalam hal pemenuhan kriteria laik tangkap dan laik simpan, tingkat pendataan kapal dan alat penangkapan ikan yang reliable, serta penyerapan teknologi penangkapan ikan yang produktif dan efisien.
- 5. Konektivitas analisis dan pemantauan pemanfaatan usaha;** Belum optimalnya konektivitas pemanfaatan usaha khususnya pada skala nelayan kecil, integrasi perizinan usaha antara pusatdaerah, maupun intensifikasi penggunaan sistem IT dalam pelaporan usaha.

#### **1.5. Sistematika Penyajian**

Laporan Kinerja PPN Brondong Tahun 2025 mengacu kepada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Adapun sistematika laporan sebagai berikut:

- 1) **Ikhtisar Eksekutif**, pada bagian ini berisi ringkasan capaian kinerja PPN Brondong Tahun 2025.
- 2) **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issue*) yang sedang dihadapi oleh organisasi.
- 3) **Bab II Perencanaan Kinerja**, pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
- 4) **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, pada bab ini berisi capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran.
- 5) **Bab IV Penutup**, pada bab ini disajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.
- 6) **Bab V Lampiran**, berisi Perjajian Kinerja, penghargaan yang diraih dan dokumen lainnya.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1. Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025

Penetapan kinerja pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong dirumuskan dalam dokumen perjanjian kinerja yang berisi penugasan dari Direktur Jenderal Perikanan Tangkap kepada Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong untuk melaksanakan program dan kegiatan pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap yang disertai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Perumusan perjanjian kinerja tahun 2025 dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Oleh karena itu indikator-indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam perjanjian kinerja mengacu pada indikator kinerja utama yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Adapun Indikator Kinerja Utama yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Tahun 2025 adalah sebagaimana pada tabel 2.

*Tabel 2 Target Kinerja PPN Brondong Tahun 2025*

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Nilai PNBP sektor perikanan tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	1	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Rp.Juta)	2.210,42
2	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong meningkat	2	Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Ton)	57.000
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong yang optimal dan bertanggungjawab	3	Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)	100
		4	Tingkat kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)	87
		5	Tingkat pelayanan kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)	95
		6	Persentase pengendalian pengembangan fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)	86
		7	Nilai pengendalian lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)	30,1
4	Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	8	Kapal perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)	618
		9	Tingkat pemenuhan persyaratan bekerja awak kapal perikanan	0,26
5	Terwujudnya layanan dukungan manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	10	Nilai PM pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)	75,5
		11	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)	85

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		12	Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)	88
		13	Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Indeks)	87
		14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)	76
		15	Persentase pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)	81
		16	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)	92
		17	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)	71,5
		18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)	88,5

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, ditetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3 Alokasi Anggaran PPN Brondong Tahun 2025

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	1,086,708,000
2	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	38,689,000
3	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	13,933,008,000
	<b>Total Anggaran Tahun 2025</b>	<b>15,058,405,000</b>

## 2.2. Rencana Aksi Penetapan Kinerja

Rencana aksi merupakan penjabaran lebih lanjut mengenai target-target kinerja yang telah disusun dan ditetapkan. Tujuan penyusunan rencana aksi sebagai alat monitor secara berkala terhadap pencapaian indikator output kinerja dan anggaran. Rencana aksi disusun hanya untuk menjabarkan IKU Perspektif *Internal Process* dan *Learning and Growth* yang di sandingkan dengan indikator kegiatan pada pencapaian setiap bulannya sehingga didapat persentase pencapaian secara berkala. Sebagaimana pada tabel perbandingan capaian IKU dan Anggaran dibawah ini, sebagai berikut ini (Tabel 4):









## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja PPN Brondong Tahun 2025 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja PPN Brondong Tahun 2025. Capaian kinerja PPN Brondong pada 8 indikator kinerja utama dengan hasil secara keseluruhan tercapai dengan nilai 114,20, dan capaian masing-masing Indikator Kinerja dapat dilihat pada Tabel 5.

*Tabel 5 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Triwulan I Tahun 2025*

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target 2025	Target MARET	Capaian MARET	%	Target s/d MARET	Capaian s/d MARET	%	Tgl Input	
<b>S.01</b>	<b>Nilai PNPB Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong</b>						120			120			
IKS.01	Perencanaan "PNSP" dan "SUK" di "Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Rp. Juta)	Rp. Juta	Maximize	Nilai Posisi Akhir	2.210,42	350	463	120	350	463	120	15/04/2025 11:18	
	Data Dukung1												
<b>S.02</b>	<b>Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Meningkat</b>						120			120			
IKS.02	Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Ton)	Ton	Maximize	Nilai Posisi Akhir	57.000,00	10.000,00	14.420,00	120	10.000,00	14.420,00	120	15/04/2025 11:18	
	Data Dukung1												
<b>S.03</b>	<b>Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Yang Optimal dan Bertanggungjawab</b>						111,38			111,38			
IKS.03.1	Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100	0	0	0	0	0	0	15/04/2025 11:18	
IKS.03.2	Tingkat kinerja pelayanan perikanan Nusantara Brondong (Nilai)	Nilai	Maximize	Rata-rata	87	87	91,91	105,6	87	91,91	106	15/04/2025 11:18	
IKS.03.3	Tingkat pelayanan kesyambandan pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	95	0	0	0	0	0	0	15/04/2025 11:18	
IKS.03.4	Persentase pengembangan pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	86	0	0	0	0	0	0	15/04/2025 11:18	
IKS.03.5	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)	Data Dukung1 Data Dukung2 Data Dukung3	Nilai	Maximize	Rata-rata	30,1	30,1	87,96	120	30,1	87,96	120	15/04/2025 11:18
<b>S.04</b>	<b>Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong</b>	<b>Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Berkelanjutan di</b>					105,54			105,54			
IKS.04.1	Kapasitas perikanan "uzi" dasar yang memenuhi ketentuan (Kapal)	Kapal	Maximize	Nilai Posisi Akhir	618	578	610	105,5	578	610	106	15/04/2025 11:18	
IKS.04.2	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	0,26	0	0	0	0	0	0	15/04/2025 11:18	
<b>S.05</b>	<b>Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong</b>						114,07			114,07			
IKS.05.1	Nilai "PM" pembangunan "ZI" Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	75,5	0	0	0	0	0	0	15/04/2025 11:18	
IKS.05.2	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	85	85	100	117,7	85	100	118	15/04/2025 11:18	
IKS.05.3	Nilai "PM" "SUK" "Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	88	0	0	0	0	0	0	15/04/2025 11:18	
IKS.05.4	Indeks "Profesionalitas ASN" di "Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Indeks)	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	87	0	0	0	0	0	0	15/04/2025 11:18	
IKS.05.5	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)	Data Dukung1 Data Dukung2	Persen	Maximize	76	76	100	120	76	100	120	15/04/2025 11:18	
IKS.05.6	Persentase "Pengelolaan" "BMN" di "Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	81	0	0	0	0	0	0	15/04/2025 11:18	
IKS.05.7	Nilai "Indikator" Kinerja Pelaksanaan Anggaran (DKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	92	0	0	0	0	0	0	15/04/2025 11:18	
IKS.05.8	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	71,5	0	0	0	0	0	0	15/04/2025 11:18	
IKS.05.9	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)	Data Dukung1 Data Dukung2	Nilai	Maximize	88,5	88,5	92,54	104,6	88,5	92,54	105	15/04/2025 11:18	

Berdasarkan capaian kinerja diatas maka dilakukan analisa terhadap pencapaian tersebut sehingga dapat memberikan data yang komprehensif sebagai bahan pengambilan kebijakan untuk kinerja organisasi ditahun berikutnya. Berikut ini adalah capaian dari masing – masing Indikator Kinerja Utama (IKU) PPN Brondong Tahun 2025:

## S.01 Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong

### IKS 01.1. Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat diluar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. PNBP pada Kementerian Kelautan dan Perikanan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada PPN Brondong terdapat 2 (dua) jenis penerimaan yaitu pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi dan pendapatan jasa pelabuhan perikanan.

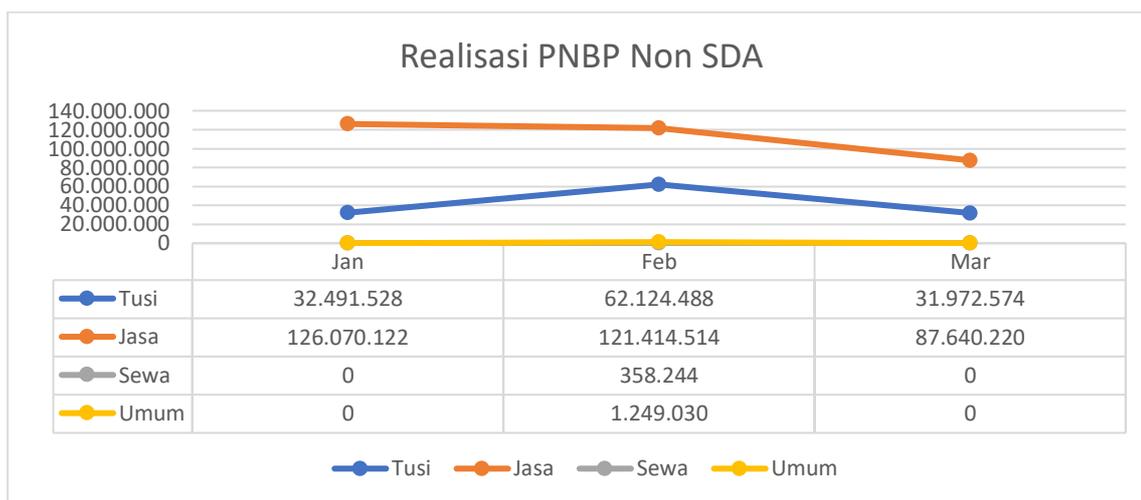
*Tabel 6 Jenis Penerimaan PNBP di PPN Brondong*

PNBP Sarana Dan Prasarana	PNBP Jasa Pelabuhan Perikanan
1. Penggunaan Tanah dalam Rangka Tusi Pelabuhan Perikanan Klaster 1;	1. Pelayanan Tambat Kapal Perikanan (>30 - 100 GT);
2. Bangunan Permanen;	2. Pelayanan Tambat Kapal Perikanan (>5 - 30 GT);
3. Pemeliharaan Prasarana;	3. Pemakaian Listrik yang Bersumber dari Daya milik PLN melalui Instalasi milik Pelabuhan Perikanan;
4. Penumpukan Barang Terbuka Tidak Beratap;	4. Pelayanan Pengadaan Air Berasal dari PDAM yang Dialirkan Melalui Pipa Dermaga/TPI;
5. Ruang Pertemuan/Aula AC Kapasitas 51 s.d 100 Orang;	5. Pelayanan bengkel;
6. Pelayanan Penggunaan Ruang Pendingin;	6. Pelayanan jasa pas masuk harian;
7. Penggunaan ABF (Frezeer);	7. Pelayanan jasa pas masuk berlangganan; dan
8. Pelayanan Tangki Air dan Instalasinya; dan	8. Pelayanan jasa kebersihan kolam pelabuhan, pertokoan/perkantorn, rumah makan kios, dan bangunan permanen tertutup
9. Pelayanan Transportasi - Crane Truck.	

Pengukuran capaian indikator kinerja “Penerimaan PNBP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong” sesuai dengan manual IKU yaitu merupakan nilai PNBP non SDA dari sektor Perikanan Tangkap di tahun berjalan sesuai PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Capaian Penerimaan PNBP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Triwulan I Tahun 2025 sebesar Rp. 463.320.720,-.

Tabel 7 Target dan Realisasi Penerimaan PNBP Non SDA Triwulan I Tahun 2025

Nama IKU	Target 2025	Triwulan I			% Terhadap Realisasi 2025
		Target	Realisasi	%	
Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Rp.Juta)	2.210	350	463	132	21



Gambar 5 Grafik Realisasi PNBP Non SDA Per Bulan di PPN Brondong Triwulan I Tahun 2025

Tabel 8 Perbandingan Realisasi Penerimaan PNBP Non SDA dengan Periode Sebelumnya

Realisasi (Rp. Juta)		Selisih (+/-) (Rp. Juta)	%
TW I 2024	TW I 2025		
527	463	- 64	-12

Realisasi PNBP Non SDA pada PPN Brondong Triwulan I Tahun 2025 melebihi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 350 Juta Rupiah dengan realisasi 463 Juta Rupiah atau 132% dan sebesar 21% dari target Tahun 2025 sebesar 2,210 Juta Rupiah. Bila dibandingkan dengan realisasi Triwulan I Tahun 2024 yaitu sebesar 527 Juta Rupiah maka capaian PNBP Non SDA pada Triwulan I Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 64 Juta Rupiah atau 12%. Penurunan capaian PNBP tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 disebabkan oleh adanya transisi peralihan dari PP No. 85 Tahun 2021 ke PP No. 27 Tahun 2014 terkait sewa tanah dan bangunan. Selain itu, belum dimulainya masa penangkapan ikan turut memengaruhi perubahan perolehan PNBP dari pas masuk harian dan tambat labuh.

Langkah-langkah operasional yang telah dilaksanakan untuk mendukung tercapainya realisasi PNBP Non SDA pada Tahun 2025 di PPN Brondong menunjukkan pendekatan yang sistematis dan terfokus pada optimalisasi pendapatan

meliputi:

1. Mengidentifikasi potensi kegiatan yang dapat menunjang peningkatan PNBP Non SDA di PPN Brondong.
2. Pembinaan terhadap stakeholder di PPN Brondong tentang sesuai PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah untuk sewa tanah dan bangunan.
3. Melakukan optimalisasi pada kegiatan pas masuk dan tambat labuh.
4. Melakukan pemeliharaan terhadap fasilitas PPN Brondong.
5. Peningkatan kompetensi petugas pengelola PNBP.

Dalam meningkatkan kembali realisasi PNBP Non SDA di PPN Brondong pada periode berikutnya maka perlu dilakukan langkah-langkah operasional sebagai berikut:

1. Melakukan pemetaan sumber daya dan aktivitas yang belum optimal untuk meningkatkan realisasi PNBP.
2. Meningkatkan sosialisasi kepada stakeholder terkait regulasi terbaru dan pentingnya kepatuhan terhadap PP Nomor 85 Tahun 2021 dan dan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah melalui media sosial PPN Brondong.
3. Melakukan inovasi pelayanan digital terhadap pelayanan usaha di PPN Brondong.
4. Pemeliharaan rutin dan peningkatan infrastruktur Pelabuhan untuk meningkatkan kenyamanan dan kelancaran operasional.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi untuk menilai efektivitas kebijakan peningkatan PNBP Non SDA, dengan memperhatikan target capaian secara berkala

## **S.02 Produktivitas Perikanan Tangkap Di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Meningkat**

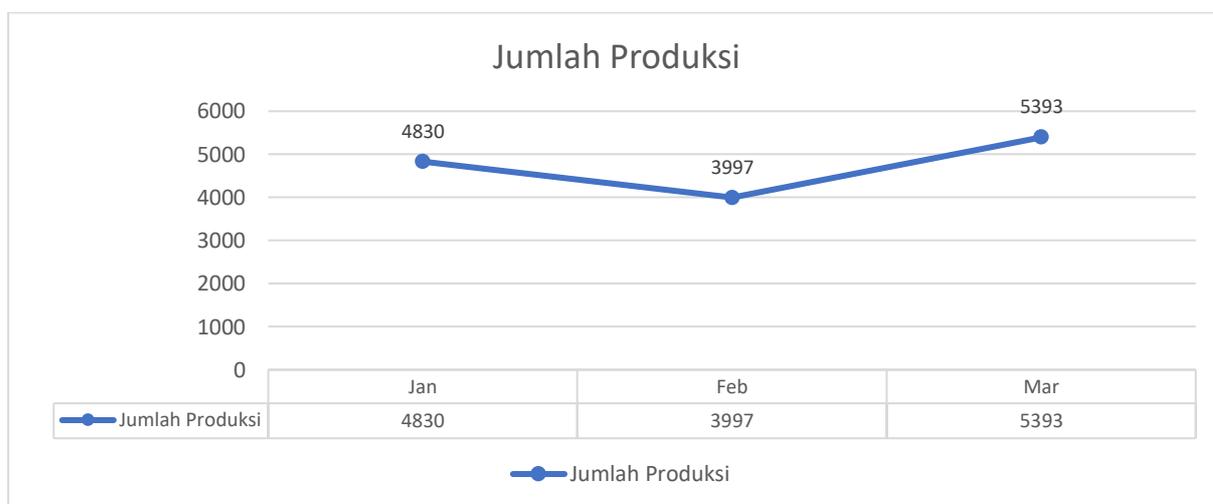
### **IKS 02.1. Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Ton)**

Produksi perikanan tangkap mencakup hasil penangkapan ikan, binatang air, dan tanaman air dari sumber perikanan alami yang bukan milik perorangan. Hasil produksi, baik yang dijual maupun yang dibayar sebagai upah, berasal dari kapal

penangkap ikan yang didaratkan di PPN Brondong. Proses pengumpulan data dilakukan oleh enumerator setiap hari dengan mencatat hasil tangkapan, yang kemudian diolah oleh petugas untuk menghasilkan data volume produksi yang divalidasi. Kinerja diukur dengan membandingkan realisasi dengan target; pencapaian dinyatakan berhasil jika realisasi sama dengan atau lebih besar dari target. Pada Triwulan I Tahun 2025, volume produksi perikanan tangkap di PPN Brondong mencapai 14.220 ton.

Tabel 9 Target dan Realisasi Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di PPN Brondong Triwulan I Tahun 2025

Nama IKU	Target 2025	Triwulan I			% Terhadap Realisasi 2025
		Target	Realisasi	%	
Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Ton)	56.740	10.000	14.220	142	25



Gambar 6 Grafik Realisasi Volume Produksi Perikanan Tangkap Per Bulan

Tabel 10 Perbandingan Realisasi Volume Produksi Perikanan Tangkap dengan Periode Sebelumnya

Realisasi (Ton)		Selisih (+/-) (Ton)	%
TW I 2024	TW I 2025		
12.585	14.220	1.635	13%

Berdasarkan tabel dan grafik diatas diketahui bahwa volume produksi perikanan tangkap di PPN Brondong Triwulan I Tahun 2025 sebesar 14.220 ton atau 142% dari target Triwulan I sebesar 10.000 ton dan sebesar 25% dari target Tahun 2025 sebesar 57.740 ton. Bila dibandingkan dengan realisasi Triwulan I Tahun 2024 yaitu sebesar 12.585 ton maka capaian volume produksi perikanan tangkap Triwulan I Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 13% atau 1.635 ton. Tercapainya volume

produksi perikanan tangkap dikarenakan meningkatnya jumlah unit kapal bongkar dan jumlah tangkapan ikan per kapal di PPN Brondong.

Langkah-langkah operasional dalam rangka pelaksanaan pencapaian IKU “Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong” meliputi:

1. Metode pengambilan data dengan sistem sensus dengan melakukan pengambilan data produksi terhadap seluruh kapal perikanan yang melakukan pembongkaran ikan di PPN Brondong.
2. Peningkatan kompetensi dan jumlah petugas pengambil data (enumerator).

Hambatan yang dihadapi dalam kegiatan ini yaitu masih dilakukan secara manual dengan melakukan wawancara terhadap nakhoda dan informasi yang didapatkan masih dalam perkiraan. Kondisi tersebut sangat dipengaruhi oleh sistem kegiatan perikanan di PPN Brondong yang masih tradisional tanpa adanya pencatatan data oleh pemilik atau nakhoda terhadap hasil tangkapan ikan serta rantai distribusi yang kompleks.

Dalam rangka meningkatkan akurasi pendataan produksi perikanan tangkap di PPN Brondong perlu dilakukan dengan melakukan pengembangan sistem pendataan dan pengolahan data yang lebih baik dengan menggunakan pendekatan ilmiah dan penggunaan Informasi Teknologi (IT). Selanjutnya melakukan peningkatan kompetensi petugas pengambil data dan pengolah data serta meningkatkan komunikasi dengan para pemilik kapal, Nakhoda, dan pemangku kepentingan, serta mengembangkan metode pengambilan data dalam meningkatkan keakurasian data.

### **S.03 Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong yang Optimal dan Bertanggungjawab**

#### **IKS 03.1. Presentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)**

Pelabuhan perikanan menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor :08/MEN/2012 memiliki 2 fungsi yaitu sebagai fungsi pemerintahan dan fungsi perusahaan. Fungsi pemerintahan pada pelabuhan perikanan yaitu melakukan pembinaan dan pengolahan, melakukan pengumpulan data dan publikasi, melaksanakan fungsi karantina ikan, serta tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan, melaksanakan kegiatan kapal perikanan,

melakukan publikasi hasil pelayanan sandar dan labuhn kapal perikanan dan kapal penelitian kelautan dan perikanan, melakukan pemantauan dan pengendalian lingkungan, dan melaksanakan kesyahbandaran, kepabeanan, dan/atau keimigrasian. Sedangkan fungsi pengusaha, pelabuhan sebagai pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan, bongkar muat ikan, pengolahan hasil perikanan, perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan, serta logistik dan perbekalan kapal pemasaran dan distribusi ikan, pemanfaatan fasilitas dan lahan di pelabuhan perikanan, penyediaan jasa kelautan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

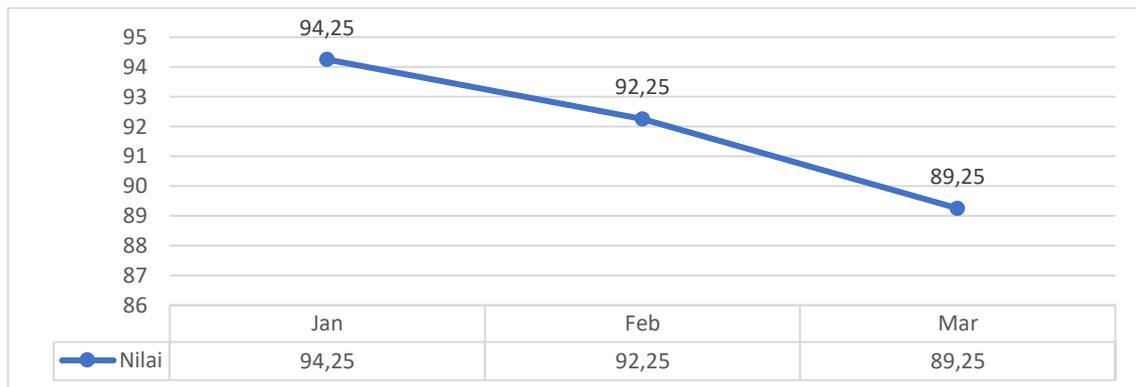
Dalam melakukan fungsi pengusaha terutama dalam pemanfaatan fasilitas dan lahan di Pelabuhan Perikanan perlu dilakukan proses analisa atau evaluasi terhadap permohonan pengusaha dalam rangka menghindari resiko yang terjadi kedepannya serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada Triwulan I Tahun 2025 IKU “Presentase permohonan pengusaha yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)” tidak dilakukan pengukuran karena dilakukan periode tahunan.

### **IKS 03. 2. Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)**

Pelabuhan perikanan harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu dalam pemenuhan fasilitas maupun pelayanan yang merupakan indikator/ parameter bagi keberhasilan capaian kinerja pelabuhan perikanan. Kinerja operasional pelabuhan perikanan berkaitan dengan segala aktivitas operasional yang ada di pelabuhan perikanan mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, pemasaran ikan dan pengawasan sumber daya ikan. Tingkat kinerja operasional pelabuhan perikanan didasarkan atas ketentuan kriteria teknis dan operasional sesuai dengan kelas pelabuhan perikanan yang terdiri : a) administrasi dan sistem informasi, b) fasilitas pelabuhan perikanan, c) pelayanan umum, dan d) investasi dan industri. Capaian indikator tingkat kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Triwulan I Tahun 2025 sebesar 91,91.

*Tabel 11 Target dan Realisasi Tingkat Kinerja PPN Brondong Triwulan I Tahun 2025*

Nama IKU	Target 2025	Triwulan I			% Terhadap Realisasi 2025
		Target	Realisasi	%	
Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)	87	87	91,91	105,6	105,6



Gambar 7 Grafik Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Triwulan I Tahun 2025

Tabel 12 Perbandingan Realisasi Tingkat Kinerja PPN Brondong dengan Periode Sebelumnya

Realisasi (Nilai)		Selisih (+/-) (Nilai)	%
TW I 2024	TW I 2025		
93,33	91,91	-1,42	-2

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa capaian IKU “Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong” Triwulan I Tahun 2025 sebesar 91,91 atau 105,6% dari target Triwulan I yang ditetapkan sebesar 87 dan sebesar 105,6% dari target tahun 2025 sebesar 87. Bila dibandingkan dengan realisasi Triwulan I Tahun 2024 yaitu sebesar 93,33 maka capaian tingkat kinerja PPN Brondong Triwulan I Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 1,42 atau 2%.

Langkah-langkah operasional dalam rangka pelaksanaan pencapaian IKU “Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong” meliputi:

1. Peningkatan kompetensi para operator Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) dalam melakukan entry data sesuai dengan ketentuan.
2. Dilakukan monitoring secara berkala oleh Tim Operasional Pelabuhan terhadap capaian laporan evaluasi kinerja.
3. Peningkatan koordinasi dan konsolidasi antar tim kerja dalam pemenuhan data pada kinerja operasional pelabuhan sesuai dengan tugas dan fungsi tim kerja.

Hambatan yang dihadapi dalam kegiatan kinerja pelabuhan perikanan yaitu belum optimalnya kegiatan pendataan penyaluran logistik kapal perikanan dari kebutuhan logistik kapal perikanan di PPN Brondong. Selain itu juga belum optimalnya pelayanan kedatangan kapal perikanan disebabkan karena masih terdapat kapal perikanan dalam proses perijinan. Langkah-langkah yang diambil guna meningkatkan capaian kinerja PPN Brondong kedepannya melalui peningkatan kompetensi petugas

dan membangun komunikasi yang efektif antar tim kerja lingkup PPN Brondong.

### **IKS 03. 3. Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)**

Kesyahbandaran di pelabuhan perikanan merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan di pelabuhan perikanan untuk menjamin keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan. Syahbandar di pelabuhan perikanan mempunyai tugas dan wewenang yaitu: (1) mengatur kedatangan kapal perikanan, (2) memeriksa ulang kelengkapan dokumen kapal perikanan, (3) menerbitkan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal Perikanan, (4) mengatur keberangkatan kapal perikanan, (5) menerbitkan Surat Tanda Bukti Keberangkatan Kapal Perikanan, (6) menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar, (7) memeriksa teknis dan nautis kapal perikanan dan memeriksa alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan, (8) memeriksa dan mengesahkan perjanjian kerja laut, (9) memeriksa log book penangkapan ikan, (10) mengatur olah gerak dan lalu lintas kapal perikanan di pelabuhan perikanan, (11) mengawasi pemanduan, (12) mengawasi pengisian bahan bakar, (13) mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan perikanan, (14) melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan, (15) memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan perikanan, (16) mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim, (17) pemenuhan persyaratan pengawakan kapal perikanan, dan (18) memeriksa sertifikat ikan hasil tangkapan.

Dalam mengukur tingkat pelayanan kesyahbandaran di PPN Brondong pada Tahun 2025 melalui 3 (tiga) indikator pelayanan administrasi pada tugas dan wewenang syahbandar di pelabuhan perikanan yang meliputi: (1) jumlah persetujuan berlayar yang diterbitkan (bobot 40%), (2) jumlah surat tanda bukti laporan kedatangan (STBLK) yang diterbitkan (bobot 40%), dan (3) jumlah sertifikat hasil tangkapan ikan (SHTI) yang diterbitkan (bobot 20%). Pada Triwulan I Tahun 2025 IKU "Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong" tidak dilakukan pengukuran karena dilakukan periode tahunan.

### **IKS 03.4. Presentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)**

Pengembangan aktivitas atau usaha perikanan di pelabuhan perikanan sering tidak diimbangi dengan pengembangan fasilitasnya sehingga menghambat terlaksananya aktivitas pelabuhan perikanan secara optimal. Pengembangan fasilitas ini penting dilaksanakan agar aktivitas dapat dilakukan secara optimal. Sarana dan prasarana yang ada terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu fasilitas pokok yang merupakan fasilitas utama yang harus ada di Pelabuhan Perikanan, fasilitas fungsional untuk memberikan pelayanan dan manfaat langsung yang diperlukan untuk kegiatan operasional, dan fasilitas penunjang yang merupakan fasilitas tambahan yang diperlukan untuk mendukung kegiatan. Pada Triwulan I Tahun 2025 IKU "Presentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong" tidak dilakukan pengukuran karena dilakukan tperiode ahunan.

### **IKS 03. 5. Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)**

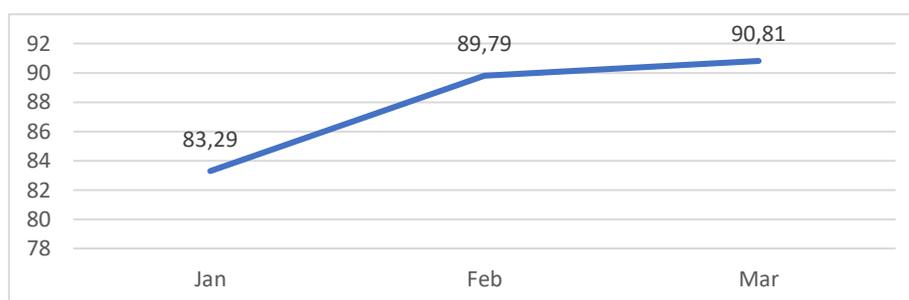
Dalam kegiatan operasional di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong dianggap perlu untuk ditinjau mengenai aspek lingkungan hidup sebagai kendali terhadap prakiraan terjadinya dampak pencemaran lingkungan dan perubahan di berbagai aspek, antara lain : aspek fisika-kimia (seperti : penurunan kualitas udara ambient, peningkatan kebisingan, penurunan kualitas air permukaan, penurunan kualitas air laut, peningkatan air larian); aspek biologi (seperti : gangguan biota air); dan aspek sosial ekonomi dan budaya (seperti : gangguan lalu lintas darat, gangguan lalu lintas perairan, peningkatan kesempatan kerja dan peluang berusaha, perubahan persepsi masyarakat, timbulan limbah padat dan limbah bahan berbahaya dan beracun) yang pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengelolaan bekerjasama dengan pihak instansi atau pihak terkait yang dilakukan secara rutin dan periodik melaksanakan pemantauan langsung ke lapangan untuk menguji baku mutu kandungan parameter perihal kegiatan tersebut.

SELARASKAN merupakan sistem informasi berbasis WEB yang berfungsi sebagai alat monitoring tata kelola lingkungan di pelabuhan perikanan yang berisikan program lingkungan hingga hasil pencapaian kualitas lingkungan yang di update berkala dan dicantumkan dalam bentuk skore Pelabuhan. Pada Triwulan I Tahun

2025 skor PPN Brondong dalam pelaksanaan program lingkungan hingga pencapaian kualitas lingkungan sebesar 87.96 dengan kategori **Sangat Baik**.

Tabel 13 Target dan Realisasi Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Brondong Triwulan I Tahun 2025

Nama IKU	Target 2025	Triwulan I			% Terhadap Realisasi 2025
		Target	Realisasi	%	
Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)	30,01	30,01	87,96	292,22	292,22



Gambar 8 Grafik Realisasi Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Brondong Per Bulan

NO	NAMA PELABUHAN	2025			SKOR KUMULATIF	SKOR RATA-RATA	KETERANGAN
		JANUARI	FEBRUARI	MARET			
1	PPN Pemangkat	97.77	97.57	96.76	292.10	97.37	SANGAT BAIK
2	PPN Sibolga	97.03	95.93	97.03	289.99	96.66	SANGAT BAIK
3	PPS Bungus	93.79	96.77	93.07	283.63	94.54	SANGAT BAIK
4	PPS Nizam Zachman Jakarta	90.69	92.63	91.16	274.47	91.49	SANGAT BAIK
5	PPS Cilacap	90.32	92.02	90.62	272.96	90.99	SANGAT BAIK
6	PPN Pengambangan	91.03	88.93	91.61	271.57	90.52	SANGAT BAIK
7	PPN Ternate	90.64	85.91	90.38	266.93	88.98	SANGAT BAIK
8	PPN Kejawanan	91.74	87.54	86.51	265.80	88.60	SANGAT BAIK
9	PPN Brondong	83.29	89.79	90.81	263.89	87.96	SANGAT BAIK
10	PPN Palabuhanratu	91.45	91.09	80.56	263.11	87.70	SANGAT BAIK
11	PPS Kendari	82.57	88.83	89.09	260.49	86.83	SANGAT BAIK
12	PPN Pekalongan	90.62	80.42	86.27	257.31	85.77	SANGAT BAIK
13	PPN Prigi	91.79	71.44	89.95	253.18	84.39	SANGAT BAIK

Gambar 9 Data IK Selaraskan Lingkup DJPT Triwulan I Tahun 2025

Tabel 14 Perbandingan Realisasi Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Brondong Triwulan I Tahun 2025

Realisasi (Nilai)		Selisih (+/-) (Nilai)	%
TW I 2024	TW I 2025		
75,58	87,96	12,38	16%

Berdasarkan table diatas, diketahui bahwa capaian IKU "Nilai Pengendalian

Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong” Triwulan I Tahun 2025 sebesar 87,96 atau 292,22% dari target yang ditetapkan sebesar 30.01 dan sebesar 292,22% dari target tahun 2025 sebesar 292,22. Dibandingkan dengan capaian tahun 2024 sebesar 75,58 maka capaian triwulan I 2025 meningkat sebesar 12,38 atau 16%,

Ketercapaian Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong” Tahun 2025 tidak terlepas dari pelaksanaan kegiatan pemantauan rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan hidup (RPL) di kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong. Selain itu, didukung dengan meningkatnya kesadaran pengguna jasa dan pegawai PPN Brondong dalam menjaga kebersihan Kawasan Pelabuhan. Pada tahun 2024, PPN Brondong berhasil meraih kategori ISO 14001 bidang lingkungan sehingga perilehan nilai dapat lebih optimal.

Dalam menunjang kegiatan pengendalian lingkungan, rencana aksi periode selanjutnya yaitu :

1. Melakukan sosialisasi kepada nelayan yang kapalnya beraktivitas di PPN Brondong untuk tidak langsung membuang air got yang mengandung minyak ke kolam pelabuhan.
2. Perlu adanya penganangan program 3R (reduce, reuse, recycle) dan bank sampah.
3. Reaktivasi IPAL Pelabuhan atau pengelolaan limbah cair sederhana.
4. Terus konsisten menyerap aspirasi, saran dan masukan dari stakeholder dan melakukan perbaikan pada sektor terkait.
5. Menambah sarana penanggulangan kebakaran di kawasan pelabuhan.
6. Meningkatkan pengelolaan limbah B3 melalui kerjasama dengan pihak terkait dalam pengelolaan limbah B3 yang sudah di tamping.
7. Sosialisasi secara rutin terkait keamanan dan ketertiban di kawasan pelabuhan dan pelarangan peredaran miras dan obat-obatan terlarang yang mungkin menjadi pemicu terjadinya gangguan kamtibmas; dan
8. Menerapkan program selaraskan secara berkelanjutan sebagai bahan monitoring serta evaluasi pengelolaan dan pemantau lingkungan di kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong.

## **S.04 Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong**

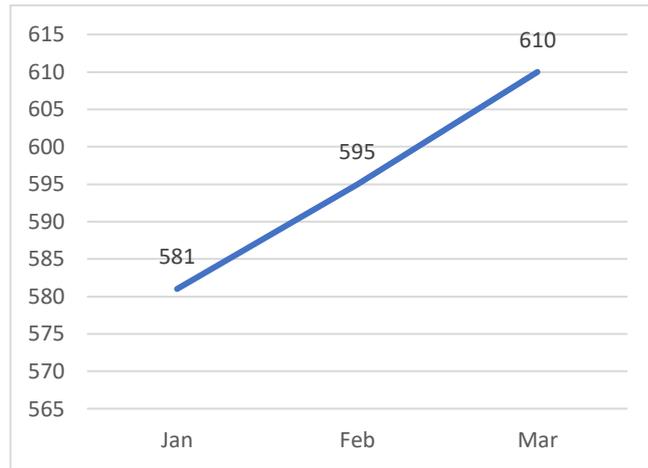
### **IKS 04.1. Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan (Kapal)**

Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan merupakan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP) yaitu surat kapal yang menyatakan bahwa kapal perikanan memenuhi aspek kelaiklautan, kelaiktangkapan dan kelaiksimpanan dalam rangka keselamatan pelayaran. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mempercepat penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP) dengan menggelar gerai pelayanan di setiap daerah. Akselerasi ini merupakan upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan prima dalam memfasilitasi nelayan dan pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Akselerasi KKP sebagai upaya pemerintah memberikan pelayanan prima diwujudkan dengan menerbitkan Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.578/MEN-KP/VII/2022 tentang Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP) Dalam Masa Transisi, kebijakan tersebut didasarkan atas pertimbangan dengan pengalihan penerbitan Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan dan Sertifikat Keselamatan Barang dari Kementerian Perhubungan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan. PPN Brondong sebagai salah satu UPT pelaksana kebijakan pada Triwulan I Tahun 2025 telah menerbitkan sebanyak 610 dokumen SKKP sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini :

*Tabel 15 Target dan Realisasi Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan di PPN Brondong Triwulan I Tahun 2025*

Nama IKU	Target 2025	Triwulan I			% Terhadap Realisasi 2025
		Target	Realisasi	%	
Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan (Kapal)	618	578	610	105,54	98,71



Gambar 10 Grafik Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan di PPN Brondong Per Bulan

Tabel 16 Perbandingan Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan Lingkungan di PPN Brondong Triwulan I Tahun 2025

Realisasi (Kapal)		Selisih (+/-) (Kapal)	%
TW I 2024	TW I 2025		
386	588	182	47

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa capaian IKU “Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan” Triwulan I Tahun 2025 sebesar 588 atau 105,54% dari target yang ditetapkan sebesar 578. Pencapaian target pada Triwulan I merupakan gabungan dari pencapaian target tahun 2023 sebesar 367 dan tahun 2024 sebesar 201. Capaian indikator ini dibandingkan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya mengalami peningkatan secara volume produk pelayanan yang dikeluarkan, hal ini disebabkan karena permohonan SKKP tahun 2024 yang menumpuk diakhir tahun sehingga proses penerbitannya dilakukan pada bulan Januari 2025.

Pencapaian IKU “Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan” didukung oleh beberapa unsur dan upaya yang telah dilakukan diantaranya:

1. Tersedianya Personel Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal;
2. Penyampaian permohonan penerbitan pembaharuan SKKP dapat dilakukan melalui Online; dan

Dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan Pelayanan Penerbitan Dokumen Kapal Perikanan khususnya SKKP di PPN Brondong pada tahun 2025, maka perlu dilakukan beberapa upaya antara lain :

1. Penambahan, penyegaran dan peningkatan kompetensi Personel Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan PPN Brondong;

2. Perlu dilakukan Gerai pelayanan Dokumen Kapal Perikanan terpadu dengan instansi terkait secara berkala dan terjadwal pada sentra Nelayan dan/atau Pelabuhan Perikanan UPTD yang termasuk dalam wilayah Binaan PPN Brondong.
3. Melakukan koordinasi dengan Direktorat Kapal dan Alat Penangkap Ikan dalam proses penjadwalan pelaksanaan pemeriksaan kapal perikanan

#### **IKS 04.2. Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan**

Pemenuhan persyaratan bekerja awak kapal perikanan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mempercepat pelaksanaan tatakelola Pengawakan Kapal Perikanan dengan menerbitkan surat edaran Menteri Kelautan dan Perikanan nomor B.2541/MEN-KP/XII/2024 tentang Layanan Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan dan Relaksasi Kebijakan Pemenuhan Persyaratan Kerja bagi Awak Kapal Perikanan pada Kapal Perikanan Berbendera Indonesia.

Pada Triwulan I Tahun 2025 IKU "Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan" tidak dilakukan pengukuran karena dilakukan periode semesteran.

### **S.05 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong**

#### **IKS 05.1. Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)**

Zona Integritas (ZI) merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pembangunan Zona Integritas mencakup dua komponen, yaitu pengungkit dan hasil. Komponen pengungkit merupakan aspek tata kelola (*governance*) internal unit kerja dan komponen hasil merupakan bagaimana stakeholder merasakan dampak/hasil dari

perubahan yang telah dilakukan pada area pengungkit. Pelaksanaan pembangunan ZI di PPN Brondong ditetapkan dengan pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) Lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong melalui SK KPA. Pada Triwulan I Tahun 2025 IKU “Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong” tidak dilakukan pengukuran karena dilakukan periode tahunan.

#### **IKS 05. 2. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)**

Tindak lanjut adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh auditan dalam rangka memperbaiki kelemahan pengendalian yang telah diidentifikasi oleh auditor dalam bentuk saran dan/atau rekomendasi dalam LHP. Tindak lanjut dalam hal ini diharapkan tidak sekedar sebagai wujud kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, namun yang lebih penting lagi adalah sebagai bentuk upaya peningkatan kinerja auditan yang menindaklanjuti. Hal tersebut dikarenakan, rekomendasi/saran yang diberikan dalam LHP adalah untuk perbaikan atas kelemahan manajemen maupun untuk peningkatan kinerja satker terkait, dengan demikian, ada korelasi antara pelaksanaan tindak lanjut dengan peningkatan kinerja yang diharapkan.

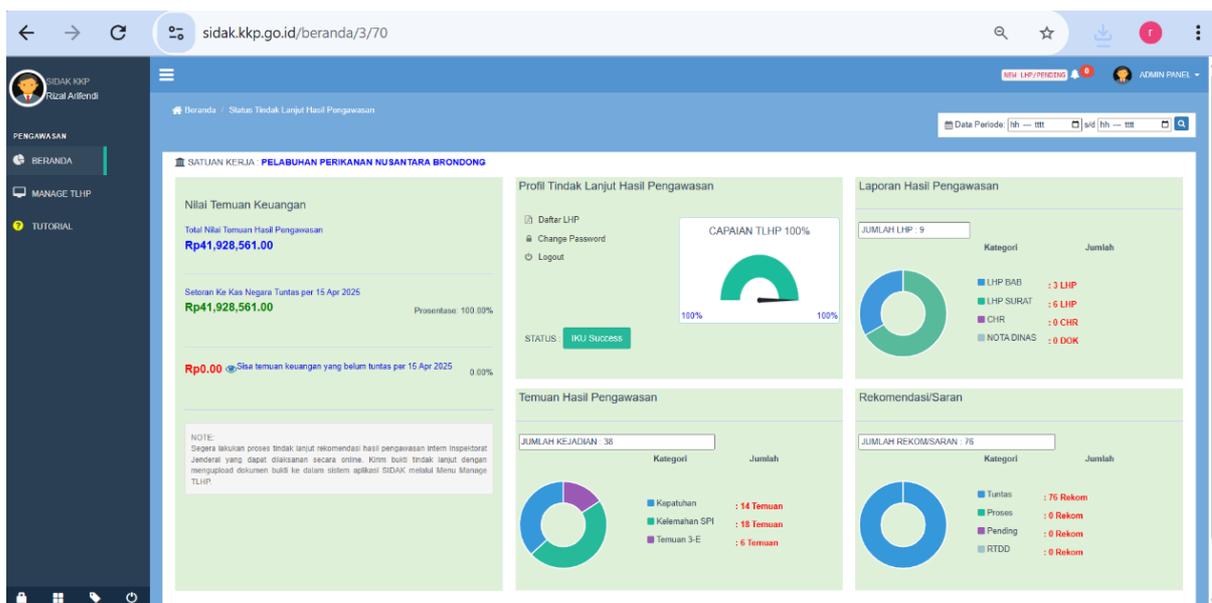
Berdasarkan Peraturan Irjen KKP Nomor 209/PER-IRJEN/2018, tentang Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan/atau Pemeriksaan di lingkungan KKP, sebagaimana pada Pasal 20 PerMenKP Nomor 29/PERMEN-KP/2014 tentang Pedoman Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, bahwa auditor dan/atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan pemantauan tindak lanjut, guna mengetahui perkembangan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan. Disisi lain, pada Pasal 25 PERMENKP Nomor 29/PERMEN-KP/2014 disebutkan antara lain bahwa Auditi wajib menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil Pengawasan Intern Inspektorat Jenderal dalam waktu 30 hari kerja setelah laporan Pengawasan Intern diterima dengan dilengkapi bukti-bukti pendukungnya. Untuk itu, semestinya, sudah menjadi kewajiban auditi, tanpa dipantau pun harus melaksanakan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan Itjen KKP.

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Ditjen Perikanan Tangkap berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2022 s.d. Triwulan

IV Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Ditjen Perikanan Tangkap yang menjadi objek pengawasan mencapai 100% berstatus tuntas ditindaklanjuti dan dimanfaatkan.

Tabel 17 Target dan Realisasi Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPN Brondong Triwulan I Tahun 2025

Nama IKU	Target 2025	Triwulan I			% Terhadap Realisasi 2025
		Target	Realisasi	%	
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)	85	85	100	117,65%	117,65%



Gambar 11 Dashboard Aplikasi SIDAK

Tabel 18 Perbandingan Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan dengan periode sebelumnya

Realisasi (Persen)		Selisih (+/-) (Persen)	%
TW I 2024	TW I 2025		
100	100	0	0

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa pemanfaatan untuk perbaikan dari rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Triwulan I Tahun 2025 adalah 100% telah dilakukan tindak lanjut perbaikan. Capaian realisasi rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja PPN Brondong adalah 100% atau 117,65% dari target Triwulan I sebesar 85% dan sebesar 117,65% dari target

tahun 2025 sebesar 85%. Dibandingkan capaian periode sebelumnya maka capaian Tahun 2025 adalah sama yaitu 100%.

Pencapaian IK “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong” tahun 2025 didukung oleh beberapa langkah-langkah operasional yaitu melakukan koordinasi secara intens secara internal dan eksternal terkait dalam menindaklanjuti terhadap rekomendasi hasil pengawasan. Dalam mempertahankan dan meningkatkan pemanfaatan hasil rekomendasi hasil pengawasan di PPN Brondong pada tahun 2025, maka dilakukan upaya yaitu:

1. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dalam progres tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan..
2. Membentuk tim khusus dalam rangka percepatan penyelesaian hasil pengawasan.
3. Mensosialisasikan kepada seluruh pegawai PPN Brondong tentang temuan pemeriksaan dan tindak lanjutnya, sehingga menjadi perhatian dan tidak menjadi temuan berulang.

### **IKS 05. 3. Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)**

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab diperlukan pertanggungjawaban dari penyelenggara negara yang dilaporkan pada akhir tahun anggaran dalam suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengatur bahwa segala pelaksanaan pembangunan oleh instansi pemerintah agar dilaporkan secara aknutabel sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan meliputi pertanggungjawaban penggunaan anggaran, keberhasilan yang dicapai, kegagalan pelaksanaan serta permasalahan – permasalahan yang dihadapi yang disertai dengan tindak lanjut pelaksanaan di tahun mendatang. Tujuan dari pelaporan kinerja ini yakni : (1) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai;

dan, (2) Menjadi dasar untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Pelaksanaan SAKIP pada PPN Brondong pada Tahun 2024 didasarkan oleh Surat Tugas Nomor B.14/PPNBR/KP.440/I/2024 tentang Penugasan Tim SAKIP Lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong. Pengukuran kinerja SAKIP dilaksanakan menggunakan pedoman evaluasi yang telah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Triwulan I Tahun 2025 IKU “Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong” tidak dilakukan pengukuran karena dilakukan periode tahunan.

#### **IKS 05.4. Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Indeks)**

Menurut UU No 5 Tahun 2014, penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas salah satunya adalah profesionalitas. Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan birokrasi harus dapat mengikuti perkembangan organisasi yang kompetitif dalam rangka mewujudkan Aparatur Negara yang profesional. Profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Untuk mengetahui tingkat profesionalitas ASN diperlukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Pengukuran indeks profesionalitas ASN akan menghasilkan peta atau potret tentang tingkat profesionalitas ASN dengan menggunakan kriteria tertentu sebagai standar profesionalitas ASN yaitu kesesuaian kualifikasi, kompetensi, tingkat kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN diharapkan

mampu memotret tingkat profesionalitas ASN pada Instansi Pemerintah dan ASN itu sendiri serta sebagai dasar pemetaan pengembangan kompetensi ASN yang diharapkan mampu meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi.

Pada Triwulan I Tahun 2025 IKU “Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong” tidak dilakukan pengukuran karena dilakukan periode semesteran.

#### **IKS 05. 5. Tingkat Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)**

Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Kegiatan ini menjadi sangat strategis dan penting untuk dilakukan pengawasan karena seingkali bernilai besar, mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi, dapat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi, mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, dan menentukan kualitas Laporan Keuangan. Karenanya, pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan kesesuaian hasil pelaksanaan terhadap perencanaan, prosedur dan aturan yang berlaku.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di (nama satker). Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan unit kerja mandiri. Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).

Pada Triwulan I Tahun 2025, pengukuran capaian kinerja IK “Tingkat Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong” sebesar 100%.

Tabel 19 Realisasi Tingkat Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Tahun 2025

**Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap**

NO	Nama_Satker	KERTAS KERJA KLARIFIKASI (file EXCEL)			REKAP RUP TERUMUMKAN (aplikasi SIRUP)		
		RUP Eksisting	Nilai Identifikasi Efisiensi Belanja	RUP Pasca Revisi	Persentase RUP Terumumkan		
		Pagu Terumumkan		Pagu Terumumkan	Selisih KERTAS KERJA - SIRUP	Pagu Terumumkan	%
1	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PELABUHAN RATU	6,552,158,000	2,941,461,000	3,610,697,000	0	3,610,697,000	100.00%
2	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN	65,696,049,000	5,508,508,000	60,187,541,000	0	60,187,541,000	100.00%
3	BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN SEMARANG	6,403,317,000	3,276,664,000	3,126,653,000	0	3,126,653,000	100.00%
4	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEKALONGAN	4,920,264,000	3,099,917,000	1,820,347,000	0	1,820,347,000	100.00%
5	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS	3,715,487,000	703,996,000	3,011,491,000	0	3,011,491,000	100.00%
6	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT	3,094,308,000	1,357,979,000	1,736,329,000	0	1,736,329,000	100.00%
7	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG	3,609,688,000	1,969,038,000	1,623,650,000	0	1,623,650,000	100.00%
8	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG	61,532,560,000	3,463,651,000	58,068,909,000	0	58,068,909,000	100.00%
9	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL	2,976,153,000	1,558,921,000	1,417,232,000	0	1,417,232,000	100.00%
10	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGANTU	6,497,602,000	3,301,931,000	3,195,671,000	0	3,195,671,000	100.00%

NO	Nama_Satker	KERTAS KERJA KLARIFIKASI (file EXCEL)			REKAP RUP TERUMUMKAN (aplikasi SIRUP)		
		RUP Eksisting	Nilai Identifikasi Efisiensi Belanja	RUP Pasca Revisi	Persentase RUP Terumumkan		
		Pagu Terumumkan		Pagu Terumumkan	Selisih KERTAS KERJA - SIRUP	Pagu Terumumkan	%
11	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KWANDANG	3,817,270,000	1,582,763,000	2,234,507,000	0	2,234,507,000	100.00%
12	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	301,142,412,000	81,549,421,000	219,592,991,000	0	219,592,991,000	100.00%
13	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG	6,367,671,000	3,959,325,000	2,408,346,000	0	2,408,346,000	100.00%
14	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN	260,214,908,000	3,727,756,000	256,487,152,000	0	256,487,152,000	100.00%
15	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERATE	5,691,813,000	2,895,497,000	2,806,316,000	0	2,806,316,000	100.00%
16	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI	40,131,847,000	5,582,775,000	34,549,072,000	0	34,549,072,000	100.00%
17	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNG PANDAN	4,741,886,000	3,397,358,000	1,344,528,000	0	1,344,528,000	100.00%
18	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SUNGAILIAT	5,016,456,000	3,801,293,000	1,215,163,000	0	1,215,163,000	100.00%
19	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN	8,285,054,000	1,787,024,000	6,498,030,000	0	6,498,030,000	100.00%
20	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI	4,080,248,000	2,147,780,000	1,932,468,000	0	1,932,468,000	100.00%
21	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP	6,263,656,000	2,516,166,200	3,747,489,800	0	3,747,489,800	100.00%
22	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIBOLGA	5,351,273,000	2,473,815,000	2,877,458,000	1,125,582,000	4,003,040,000	139.12%
23	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBON	5,110,199,000	2,895,155,112	2,215,043,888	(116,240,888)	2,098,803,000	94.75%
24	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN	30,796,027,000	18,028,494,000	12,767,533,000	(2,609,427,000)	10,158,106,000	79.59%
	<b>TOTAL</b>	<b>852,006,306,000</b>	<b>163,533,688,312</b>	<b>688,474,617,688</b>	<b>(1,600,085,888)</b>	<b>686,874,531,800</b>	<b>99.77%</b>

Tabel 20 Target dan Realisasi Tingkat Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di PPN Brondong Triwulan I Tahun 2025

Nama IKU	Target 2025	Triwulan I			% Terhadap Realisasi 2025
		Target	Realisasi	%	
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di PPN Brondong (Persen)	76	76	100	131,58	131,58

Tabel 21 Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di PPN Brondong dengan periode sebelumnya

Realisasi (Persen)		Selisih (+/-) (Persen)	%
TW I 2024	TW I 2025		
-	100	-	-

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa Tingkat Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong adalah sebanyak 100 atau lebih besar dari target sebesar 76 sehingga persentase

capain kinerja sebesar 131,58%. Indikator ini merupakan indikator yang ditetapkan pada Tahun 2025, sehingga tidak dapat dilakukan analisa perbandingan terhadap periode sebelumnya maupun jangka menengah.

Pencapaian IK “Tingkat Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong” tahun 2025 didukung oleh beberapa langkah-langkah operasional yaitu:

1. Penyusunan perencanaan pengadaan secara tepat waktu dan terintegrasi dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) sejak awal tahun anggaran.
2. Optimalisasi penggunaan aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).
3. Verifikasi dan validasi dokumen RUP.
4. Dokumentasi seluruh proses penyusunan dan pengumuman RUP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam mempertahankan dan meningkatkan tingkat Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di PPN Brondong, maka dilakukan upaya yaitu:

1. Peningkatan perencanaan terhadap pengadaan barang/jasa secara akuntabel.
2. Evaluasi berkala terhadap RUP yang telah diumumkan, guna memastikan keterpenuhan seluruh paket kegiatan dan mengidentifikasi potensi kekurangan.
3. Meningkatkan kompetensi pegawai dalam penyusunan RUP melalui diklat atau pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah.
4. Mengintruksikan pejabat pengadaan untuk mempercepat finalisasi dan penginputan data RUP ke dalam SIRUP segera setelah data kegiatan tersedia dan memenuhi persyaratan teknis.

#### **IKS 05. 6. Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)**

Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) lingkup PPN Brondong merupakan salah satu kegiatan strategis yang mendukung dan menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Pengelolaan BMN mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi PPN Brondong dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas

laporan keuangan. Keterlibatan sumber daya yang besar dalam pengelolaan BMN seringkali diikuti dengan berbagai hambatan/ permasalahan, dan bahkan menjadi temuan berulang aparat pengawasan internal maupun eksternal. Pengukuran kepatuhan pengelolaan BMN diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur sebagai berikut (1) tingkat pemanfaatan rencana kebutuhan BMN (RKBMN), (2) tersedianya usulan PSP BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST, (3) tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset), (4) penggunaan bmn hasil pengadaan belanja modal di dukung berita acara serah terima (BAST)/berita acara pemakaian, dan (5) penyusunan laporan BMN (semesteran dan tahunan) secara tepat waktu. Metode pengukuran capaian kinerja dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang ditetapkan sehingga capaian dinyatakan tercapai jika realisasi lebih besar atau sama dengan target, dan bila realisasi lebih kecil maka kinerja tidak tercapai.

Pada Triwulan I Tahun 2025 IKU “Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong” tidak dilakukan pengukuran karena dilakukan periode tahunan.

#### **IKS 05. 7. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)**

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Pengukuran dilakukan terhadap 3 (tiga) aspek meliputi (1) kualitas perencanaan anggaran, (2) kualitas pelaksanaan anggaran, dan (3) kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Jumlah indikator kinerja yang dilakukan pengukuran dalam IKPA sebanyak 8 (delapan) yaitu (1) revisi DIPA, (2) Deviasi halaman III DIPA, (3) data kontrak, (4) penyelesaian tagihan, (5) pengelolaan UP dan TUP, (6) dispensasi SPM, (7) penyerapan anggaran, dan (8) capaian output. Metode pengukuran capaian kinerja dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang ditetapkan sehingga capaian dinyatakan tercapai jika realisasi lebih besar atau

sama dengan target, dan bila realisasi lebih kecil maka kinerja tidak tercapai.

Pada Triwulan I Tahun 2025 IKU “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong” tidak dilakukan pengukuran karena dilakukan periode semesteran.

#### **IKS 05. 8. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)**

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran. Perlu menetapkan Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) atau biasa disebut Nilai Kinerja Anggaran (NKA) sebagai Indikator Kinerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (K/L) diperoleh dari penggabungan 50% nilai kinerja perencanaan anggaran dan 50% nilai kinerja pelaksanaan anggaran.

- Nilai Kinerja Anggaran > 90 persen sampai dengan 100 persen dikategorikan Sangat Baik;
- Nilai Kinerja Anggaran > 80 persen sampai dengan 90 persen dikategorikan Baik;
- Nilai Kinerja Anggaran > 60 persen sampai dengan 80 persen dikategorikan Cukup atau Normal;
- Nilai Kinerja Anggaran > 50 persen sampai dengan 60 persen dikategorikan Kurang;
- Nilai Kinerja Anggaran sampai dengan 50 persen dikategorikan Sangat Kurang;

Pada Triwulan I Tahun 2025 IKU “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)” tidak dilakukan pengukuran karena dilakukan periode tahunan.

#### **IKS 07. 9. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Indeks)**

Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara

pelayanan publik dan untuk mengetahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing. Hasil penilaian Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Triwulan I Tahun 2025 sebesar 92,54

Hasil Penyelenggaraan SKM Triwulan I tahun 2025 lingkup Ditjen Perikanan Tangkap

Unit Pelayanan Publik	Jumlah Responden	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	Hasil SKM
BBPI Semarang	56	3,839	3,839	3,821	3,714	3,786	3,821	3,857	3,821	3,893	95,54
Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	628	3,658	3,610	3,610	3,637	3,653	3,618	3,631	3,610	3,634	90,72
Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	76	3,553	3,553	3,553	3,566	3,566	3,539	3,553	3,566	3,579	88,96
Direktorat Perizinan dan Kenelayanan	1338	3,580	3,547	3,527	3,541	3,549	3,532	3,534	3,532	3,544	88,57
PPN Ambon	54	3,852	3,796	3,759	3,759	3,741	3,852	3,926	3,815	3,852	95,42
PPN Brondong	83	3,735	3,759	3,687	3,699	3,663	3,711	3,723	3,687	3,651	92,54
PPN Karangantu	184	3,761	3,679	3,668	3,826	3,712	3,663	3,755	3,571	3,408	91,79
PPN Kejawan	130	3,815	3,823	3,777	3,762	3,769	3,808	3,815	3,762	3,792	94,79
PPN Kwandang	72	3,847	3,833	3,833	3,861	3,861	3,694	3,792	3,847	3,806	95,49
PPN Palabuhanratu	99	3,798	3,798	3,747	3,778	3,758	3,768	3,778	3,768	3,778	94,36
PPN Pekalongan	54	3,944	3,944	3,907	3,944	3,889	3,963	3,907	3,759	3,796	97,38
PPN Pemangkat	192	3,948	3,938	3,943	3,891	3,901	3,875	3,964	3,901	3,875	97,87
PPN Pengambangan	182	3,791	3,775	3,736	3,775	3,742	3,802	3,797	3,758	3,731	94,18
PPN Prigi	118	3,805	3,805	3,720	3,754	3,780	3,653	3,703	3,668	3,653	93,17
PPN Sibolga	134	3,731	3,716	3,724	3,724	3,716	3,709	3,709	3,724	3,746	93,06
PPN Sungailiat	68	3,824	3,838	3,824	3,750	3,809	3,735	3,735	3,529	3,529	93,26

Gambar 12 Hasil Penyelenggaraan SKM Triwulan I Tahun 2025 Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap

Tabel 22 Target dan Realisasi Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup PPN Brondong Triwulan I Tahun 2025

Nama IKU	Target 2025	Triwulan I			% Terhadap Realisasi 2025
		Target	Realisasi	%	
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Indeks)	88,50	88,50	92,54	104,56	104,56

Tabel 23 Perbandingan Persentase Rekomendasi Hasil Penyelenggaraan SKM

Realisasi (Rp) (indeks)		Selisih (+/-) (Indeks)	%
TW I 2024	TW I 2025		
88,95	92,54	3,59	4

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa nilai survei kepuasan masyarakat di PPN Brondong triwulan I tahun 2025 sebesar 92,54 atau 104,56% dari target yang

ditetapkan sebesar 88,50. Dibandingkan capaian triwulan I tahun 2024, terjadi kenaikan sebesar 3,59 atau 4%.

Pencapaian IK “Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong” tahun 2025 didukung oleh beberapa langkah-langkah operasional yaitu adanya peran aktif para pengguna jasa sebagai responden dan proaktif para petugas dalam melakukan pendampingan pengisian kuisisioner SKM melalui aplikasi Susan KKP. Dalam mempertahankan dan meningkatkan capaian SKM yang berkualitas di PPN Brondong, maka dilakukan upaya yaitu penyusunan tim SKM lingkup PPN Brondong dan melakukan perbaikan pada pelayanan di PPN Brondong.

### 3.2. Realisasi Anggaran

PPN Brondong pada Tahun 2025 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.058.405.000,- dengan realisasi belanja pada sebesar Rp. 3.064.310.784,- atau (20.35%). Rincian realisasi anggaran PPN Brondong pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

*Tabel 24 Realiasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan PPN Brondong Tahun 2025*

Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	(%)
2338   Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	1.086.708.000	2.474.190	0.25
2341   Pengelolaan Sumber Daya Ikan	38.689.000	0	0
2342   Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	13.933.008.000	3.061.836.594	21.98
<b>Total</b>	<b>15.058.405.000</b>	<b>3.064.310.784</b>	<b>20.35</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja PPN Brondong pada Triwulan I Tahun 2025 melalui pencapaian target indikator kinerja yang diinput dalam Sistem Pengelolaan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KINERJAKU), diperoleh Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 114,20 % kategori **Istimewa**. Dengan tercapainya seluruh target IKU dan IKM pada Triwulan I Tahun 2025, diharapkan upaya optimalisasi tetap dilakukan melalui inovasi kegiatan baru dan peningkatan kreativitas agar capaian dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah PPN Brondong menjadi wujud pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai sasaran program dan mengukur sejauh mana SAKIP telah diimplementasikan. Berbagai perbaikan mendasar telah dilakukan, meliputi perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi kinerja, serta pencapaian sasaran organisasi.

## LAMPIRAN



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782  
LAMAR [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ibrahim

Jabatan : Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Lotharia Latif

Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

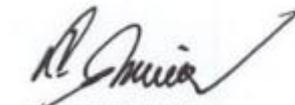
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 24 Januari 2025

Pihak Kedua  
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

  
Lotharia Latif

Pihak Pertama  
Kepala Pelabuhan Perikanan  
Nusantara Brondong

  
Ibrahim

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Nilai PNBPN sektor perikanan tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	1 Penerimaan PNBPN Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Rp. Juta)	2.210,42
2	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong meningkat	2 Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Ton)	57.000
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong yang optimal dan bertanggungjawab	3 Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)	100
		4 Tingkat kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)	87
		5 Tingkat pelayanan kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)	95
		6 Presentase pengendalian pengembangan fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)	86
		7 Nilai pengendalian lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)	30,1
4	Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	8 Kapal perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)	618
		9 Tingkat pemenuhan persyaratan bekerja awak kapal perikanan	0,26
5	Terwujudnya layanan dukungan manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	10 Nilai PM pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)	75,5
		11 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)	85
		12 Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)	88
		13 Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Indeks)	87
		14 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)	76
		15 Persentase pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)	81
		16 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)	92
		17 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)	71,5
		18 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Indeks)	88,5

**DATA ANGGARAN :**

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	1,086,708,000
2	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	38,689,000
3	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	13,933,008,000
<b>Total Anggaran Tahun 2025</b>		<b>15,058,405,000</b>

Jakarta, 24 Januari 2025

Pihak Kedua  
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap



Lotharia Latif

Pihak Pertama  
Kepala Pelabuhan Perikanan  
Nusantara Brondong



Ibrahim